

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Regional Intellectual Capital (RIC) di suatu negara kini telah melekat dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu individu, perusahaan, lembaga, komunitas, dan wilayah karena hal tersebut merupakan sumber kekayaan untuk saat ini dan di masa yang akan datang, sedangkan untuk mencapai hal tersebut perlu dan penting untuk memiliki sistem pemetaan yang dapat menggambarkan RIC suatu negara secara sistematis (Bontis, 2004). RIC di Indonesia disajikan berdasarkan indikator *Human Capital*, *Market Capital*, *Process Capital*, *Renewal Capital*, *Financial Capital*, *Regional Capital* (Ulum *et al.*, 2023).

Pentingnya pengungkapan *Regional Intellectual Capital* di suatu wilayah dapat membantu dan memahami potensi ekonomi di suatu daerah sehingga memungkinkan untuk pemerintah, investor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan identifikasi keunggulan kompetitif dan peningkatan investasi karena setiap daerah pasti memiliki kebebasan dalam mengembangkan potensi dan inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan masyarakat (Rasyid *et al.*, 2020). Mulai tahun 2019 Indonesia sudah berkomitmen untuk berhasil melakukan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) sebagai program pencapaian pembangunan di tahun 2030 (Linggarwati *et al.*, 2021).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI. No. 111 Tahun 2022 (2022), tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet melalui pencapaian 17 tujuan dan sasaran global sampai tahun 2030 serta sasaran nasional rencana

pembangunan jangka nasional untuk tahun 2020-2024. Dengan adanya hal tersebut dapat mendorong pemerintah untuk berkontribusi secara langsung pada pencapaian ekonomi berkelanjutan yang mengutamakan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2021), permasalahan yang dihadapi masyarakat secara global juga berkaitan dengan kesulitan pembangunan di Indonesia pada saat ini, komitmen Indonesia dalam mencapai SDGs ini bukan hanya untuk memenuhi kesepakatan global tetapi juga untuk mencapai cita-cita Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola potensi sumber daya Indonesia, untuk mempercepat pembangunan pemerintah harus berkonsentrasi pada pemerataan infrastruktur di Indonesia saat ini agar tercapai kesuksesan dalam penanganan bonus demografi, pengoptimalan SDA dan pengumpulan sumber daya modal ekonomi (Wisnumurti et al., 2018). Namun sumber daya Indonesia yang terbatas membuat pemerintah melakukan pemetaan prioritas atas tujuan dan target pada SDGs yaitu dengan mempertimbangkan target yang paling penting untuk ditangani yang di dalamnya terdiri dari masalah kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pertanian dan ketahanan pangan berkelanjutan, infrastruktur, layanan yang berkaitan dengan ekosistem dan biodiversitas, serta pembiayaan administrasi pemerintah (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021).

Selanjutnya, untuk memiliki kemampuan peningkatan produktivitas perekonomian nasional, sumber daya manusia yang telah dipersiapkan harus diberikan kesempatan kerja yang sama dengan membuka sektor ekonomi baru untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat (Doni, 2023). Perlunya pemerintah Indonesia melakukan pemetaan terhadap sumberdaya manusia (SDM) atau *human capital* sebelum melaksanakan program pengembangan dan peningkatan kompetensi. Dilihat dari sisi kekuatan *human capital*,

Indonesia bisa dikatakan masih tertinggal dengan beberapa negara tetangga. Berdasarkan *Human Development Reports* pada tahun 2021 IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Indonesia menunjukkan angka sebesar 0,705 hal ini lebih rendah dari negara tetangga seperti Singapura dengan IPM sebesar 0.939 dan Malaysia dengan 0,803 (Programme, 2021). Perbedaan tersebut menunjukkan Singapura dan Malaysia memiliki harapan hidup, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan nasional yang lebih tinggi dari pada Indonesia.

Berdasarkan website resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pemerintah Indonesia mendorong adanya pemetaan wilayah yang memiliki tren peningkatan investasi, dengan adanya pemetaan dapat meningkatkan investasi yang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo sebesar Rp 1.400 triliun di tahun 2024 serta dapat menghindari permasalahan mengenai perizinan dan terkait lahan yang terjadi di tahun 2022 (<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id>). Sementara itu, kondisi usaha *start-up* di Indonesia sekarang menurun karena tidak paham cara mengolah investasi di tahap awal, sehingga banyak *start-up* yang gagal, menciptakan kehancuran finansial dan menghilangkan lapangan pekerjaan (Maryoto, 2023). Maka dari itu setiap unit organisasi membutuhkan peta proses bisnis yang menjelaskan proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi (Widhiyanti & Tamtomo, 2020).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa sampai saat ini masih terdapat sebanyak 16 dari 34 provinsi di Indonesia dengan tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi dari target pembangunan di tahun 2024 mendatang dan Jawa Timur masuk diantara ke 16 provinsi tersebut dengan tingkat kemiskinan kisaran 8,50% sampai 8.90%. Angka tersebut dikatakan masih tinggi yang dimana target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk tingkat kemiskinan di Indonesia sekitar 6%-7% dan kemiskinan ekstrem mendekati 0% di tahun 2024 (<https://databoks.katadata.co.id/>).

Penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia tentu saja menjadi tantangan yang cukup berat bagi Indonesia. Permasalahan kemiskinan dan kelaparan sampai saat ini masih menjadi permasalahan di Indonesia yang belum ditangani dengan baik. Ekonomi berkelanjutan memiliki tujuan dalam hal memelihara keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat yang dapat membantu meningkatkan kualitas ekonomi bagi pemerintahan di Indonesia, terlebih lagi pemerintah daerah.

Adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diketahui bagaimana keuangan setiap kabupaten atau kota berjalan serta dapat ditingkatkan melalui pelayanan di setiap kabupaten atau kota dengan ditunjang oleh infrastruktur yang memadai agar dapat meningkatkan PAD dan memaksimalkan pelayanan publik di berbagai sektor (Yasin, 2020). Pemerintah kabupaten/kota juga memerlukan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai usaha, dan untuk mencapai hal tersebut diperlukan keikutsertaan seluruh pihak yang terkait dan hubungan kerjasama antar daerah (Putra, 2018).

Pengungkapan RIC di Karesidenan Madiun perlu dilakukan karena pada tahun 2015-2019 PAD Karesidenan Madiun mengalami perkembangan yang fluktuatif, dimana dari tahun ketahun terjadi kenaikan dan penurunan yang disebabkan oleh beberapa faktor, selain itu perkembangan IPM juga tidak mampu mendorong berkurangnya tingkat pengangguran terbuka, hal ini dikarenakan IPM yang tinggi itu hanya didominasi dengan angka pendidikan, kesehatan dan daya beli, sedangkan untuk produktivitas, kesinambungan, dan pemberdayaan masih kurang dikembangkan, maka dari itu berdampak pada kualitas kerja di masing-masing individu tenaga kerja serta tingginya angka kemiskinan di Karesidenan Madiun juga masih menjadi permasalahan yang utama (Efrintya et al., 2021 ; Nugroho & Marseto, 2022 ; Zain, 2022 ; Amami & Asmara, 2022)

Rendahnya nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan meningkatnya nilai pertumbuhan ekonomi justru mengakibatkan adanya penambahan jumlah pengangguran, hal ini dikarenakan tenaga kerja yang ada

di Karesidenan Kediri bukanlah penduduk asli daerah tersebut sehingga hal tersebut tidak dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan signifikan (Rohmah, 2021 ; Risma Novitasari & Mulya Sari, 2023). Selain itu Tingkat Pendidikan juga perlu dikembangkan lagi hal ini karena program pemerintah di beberapa kabupaten/kota di Karesidenan Kediri belum bisa bekerja maksimal terhadap pencapaian angka melek huruf (Junaedi & Muljaningsih, 2022). Disisi lain pemetaan subsektor unggulan di Karesidenan Kediri dinilai memiliki laju pertumbuhan lebih cepat jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur (Hidayah & Sumanto, 2022).

Suatu daerah dikatakan sukses dalam perekonomiannya ketika masyarakat mampu mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Untuk mencapai keberhasilan ini, setiap tempat harus berkonsentrasi pada peningkatan pembangunan ekonominya sehingga bisa ditinjau mengenai pertumbuhan perekonomian suatu daerah tersebut. Sektor industri terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus menerus untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk meningkatkan kesempatan kerja, menciptakan lebih banyak lapangan usaha, meningkatkan dan meratakan pendapatan penduduk, mengurangi populasi miskin, dan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan suatu kabupaten/kota (Syah *et al.*, 2023).

Trequattrini *et al.*, (2018), telah melakukan penelitian mengenai *Regional Intellectual Capital (RIC)* dengan judul *The Impact of Entrepreneurial Universities on Regional Growth: a Local Intellectual Capital Perspective*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *entrepreneurial universities* berperan penting dalam mengolah dan meningkatkan modal intelektual lokal dan memungkinkan pertumbuhan wilayah pembelajaran. Agar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat tercapai, dengan melalui pendidikan wirausaha menjadi dasar pembangunan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas SDM nya, sehingga pemerintah perlu membuat kebijakan untuk memprioritaskan dan mempromosikan *strat-up* atau wirausaha rintisan yang baru saja beroperasi.

Sementara itu, penelitian mengenai ekonomi berkelanjutan telah dibuktikan oleh Winarto *et al.*, (2022), dengan judul Pengaruh *Human Capital*, Upah Minimum dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan metode penelitian regresi linier berganda untuk data tahun 2011-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *human capital* dan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan variabel angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Tengah.

Human capital ini berperan penting pada tingkat kinerja suatu organisasi yang dimiliki oleh seorang pekerja, jumlah angkatan kerja yang meningkat harus diiringi dengan bertambahnya lapangan pekerjaan atau diadakan mengenai pelatihan dan keterampilan dengan begitu angkatan kerja akan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, karena semakin tingginya pertumbuhan ekonomi maka tingkat pengangguran semakin rendah sehingga dapat tercapai kesejahteraan masyarakat, namun pemerintah daerah juga perlu menetapkan upah minimum bagi para pekerja agar pemberi kerja tidak sewenang-wenang dalam pemberian upah dan hak para pekerja dapat diterima dengan penuh.

Singh *et al.*, (2022), telah melakukan penelitian mengenai SDGs dengan judul *Impact of Sustainable Development Goals on Economic Growth in Saudi Arabia: Role of Education and Training*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan serta lapangan kerja yang layak berhubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDB, sedangkan kemiskinan, kelaparan, dan kesehatan berhubungan negatif. Perlunya berinvestasi lebih banyak pada pendidikan, pelatihan dan kesehatan untuk mencapai tujuan SDGs sehingga dapat mengurangi kemiskinan, kelaparan, dan ketimpangan serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Transformasi modernisasi di bidang ekonomi sangat dibutuhkan pada saat ini, masyarakat harus bisa memilah dan memilih mana proses modernisasi yang bisa merubah kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat menjadi yang lebih baik, sehingga dapat merasakan langsung efek dari modernisasi tersebut. Ulum *et al.*, (2023), dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, modernisasi bukanlah suatu hal yang perlu ditakuti namun modernisasi merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan dan dihindari. Pemerintah daerah tentu harus bisa melakukan transformasi ekonomi tersebut guna terlaksananya ekonomi yang berkelanjutan..

Karesidenan Madiun dan Karesidenan Kediri dipilih oleh peneliti dengan beberapa alasan seperti di Kabupaten Madiun yang masuk diantara beberapa jajaran kabupaten/kota di Karesidenan Madiun terpilih menjadi wilayah prioritas penanganan kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2022-2024 (Wisnutama *et al.*, 2023). Selain itu berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur Februari 2023 realisasi PAD terbesar berada di Kabupaten Kediri yaitu sebesar 122,71% dari anggaran dan realisasi lain-lain PAD yang sah Kabupaten Kediri mencapai 143,01% yang diikuti dengan realisasi Retribusi Daerah sebesar 110,90%, tentu saja realisasi PAD yang tinggi di Kabupaten Kediri tersebut tidak terlepas atas dukungan pendapatan salah satu pabrik rokok besar yang ada di Kediri (<https://www.bi.go.id>).

Penelitian ini dilakukan karena untuk mengetahui bagaimana pengimplementasi RIC di Karesidenan Madiun dan Karesidenan Kediri berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam mendukung ekonomi berkelanjutan, sebagai bentuk tanggung jawab antara pemerintah daerah dengan masyarakat yang selanjutnya baik buruknya hasil pengungkapan, banyak sedikitnya komponen yang diungkapkan pada laporan tahunan akan

memotivasi pemerintah untuk semakin giat lagi dalam mendukung ekonomi berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi RIC untuk mendukung ekonomi berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan pengimplementasian RIC untuk mendukung ekonomi berkelanjutan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur ilmu akuntansi khususnya pada Akuntansi Manajemen dan dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya mengenai implementasi *Regional Intellectual Capital*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai pengimplementasian *Regional Intellectual Capital* di Karesdinan Madiun dan Karesidenan Kediri dalam mendukung ekonomi berkelanjutan.

